

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berhasil atau tidaknya program-program pembangunan di negara berkembang sering dinilai dari tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan *output* dan pendapatan nasional (Todaro dan Smit, 2004).

Setiap negara pasti mempunyai tujuan dalam pembangunan ekonomi termasuk Indonesia. Menurut Haryanto (2013) pembangunan ekonomi adalah usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup suku bangsa yang sering kali di ukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Secara umum, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Todaro (2006), pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam

pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Proses pembangunan tersebut memiliki beberapa tujuan meliputi berbagai perubahan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti tujuan keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain cukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*), merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat yang berada di suatu bangsa atau negara. Jika dilihat Indonesia memiliki banyak provinsi yang memiliki keanekaragaman di setiap daerahnya. Salah satu provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kota Kabupaten dan tingkat pertumbuhan ekonominya yang berbeda. Sebagai gambaran tentang pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 - 2020**

No	Kota/Kab	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pesisir Selatan	5,73	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11
2	Kab. Solok	5,44	5,31	5,32	5,22	5,07	-1,12
3	Kab. Sijunjung	5,69	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,1
4	Kab. Tanah Datar	5,33	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13
5	Kab. Padang Pariaman	6,14	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46
6	Kab. Agam	5,52	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38
7	Kab. Lima Puluh Kota	5,61	5,32	5,53	5,26	5,1	-1,16
8	Kab. Pasaman	5,34	5,07	5,08	5	4,84	-0,87
9	Kab. Kepulauan Mentawai	5,2	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85

No	Kota/Kab	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Kab. Dharmasraya	5,75	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39
11	Kab. Solok Selatan	5,35	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
12	Kab. Pasaman Barat	5,7	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34
13	Kota Padang	6,41	6,17	6,23	6,09	5,68	-1,86
14	Kota Solok	5,97	5,76	5,76	5,68	5,53	-1,42
15	Kota Sawahlunto	6,03	5,72	5,74	5,52	5,34	-1,27
16	Kota Padang Panjang	5,91	5,8	5,8	5,73	5,59	-1,44
17	Kota Bukittinggi	6,14	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74
18	Kota Payakumbuh	6,19	6,08	6,12	6,05	5,92	-1,66
19	Kota Pariaman	5,79	5,59	5,61	5,5	5,33	-1,32

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Dimana terjadi pergerakan yang fluktuatif atau pergerakan yang naik turun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi terbaik pada tahun 2015 yaitu 6,41 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu Kab. Kepulauan Mentawai yaitu 5,2 persen. Untuk tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Padang dengan capaian 6,17 persen dan terendah yaitu Kab. Kepulauan Mentawai dengan capaian 5,0 persen. Untuk tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Padang dengan capaian 6,23 persen dan terendah yaitu Kabupaten Pasaman dengan capaian 5,1 persen. Untuk tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Padang dengan capaian 6,09 persen dan terendah yaitu Kab. Kepulauan Mentawai dengan capaian 4,9 persen. Untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Payakumbuh dengan capaian 5,92

persen dan terendah yaitu Kab.Padang Pariaman dengan capaian 2,5 persen. Untuk tahun 2020 secara keseluruhan Kota Kabupaten yang berada di Sumatera barat pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan, penurunan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kabupaten Pasaman mengalami penurunan hingga -0,87 persen dan tertinggi penurunannya yaitu yaitu Kabupaten Padang Pariaman sampai -10,46 persen.

Berdasarkan pemaparan data pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat bahwa belum adanya pemerataan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, selama ini kesejahteraan hanya terkonsentrasi di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sentra industri dan sumber daya yang berbeda sehingga pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dari tahun ketahu di setiap Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

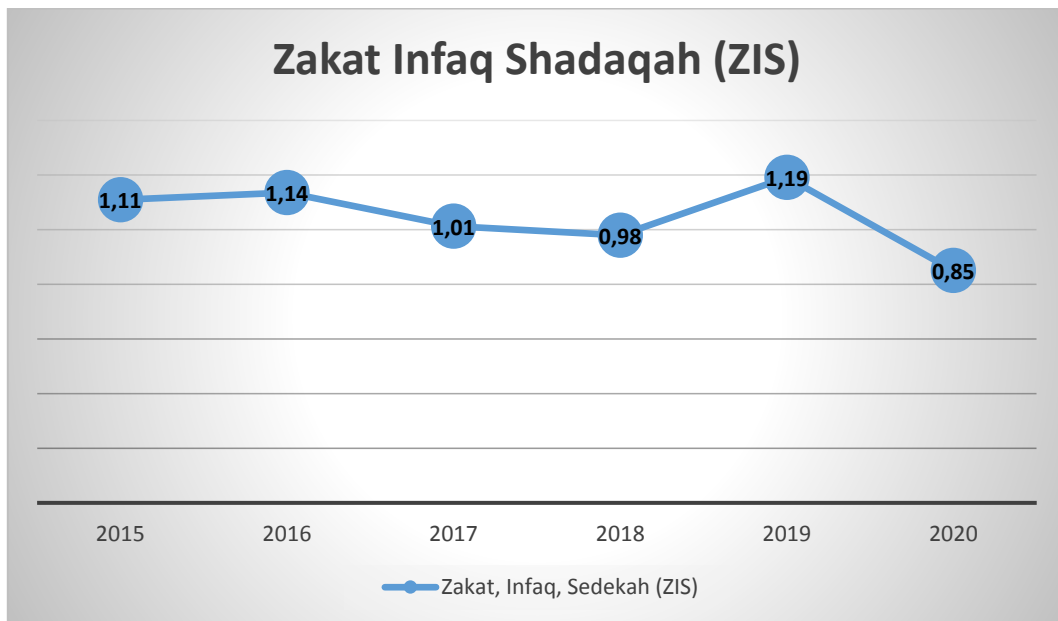
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan *output* (barang dan jasa) diperlukan *input* dalam proses produksi yaitu berupa modal dan tenaga kerja, yang dijabarkan dalam teori pertumbuhan *solow-swan* berdasarkan fungsi produksi *cobb-douglas*. Faktor produksi meliputi modal, tenaga kerja dan teknologi sebagai faktor eksogen (Kuncoro, 2010).

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam prepektif ekonomi Islam juga terdapat pada penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Kriyantono (2008) dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang memberikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar, dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan *output* (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan

kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai dasar Islam tentang penunaian Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist harus dilakukan sesuai syariat Islam dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu golongan 8 ashnaf (fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil), dengan demikian dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang berada di bawah garis kemakmuran. Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang disalurkan kepada golongan 8 ashnaf tidak hanya di gunakan untuk meningkatkan konsumsi saja, tetapi dapat juga dikembangkan menjadi modal kerja yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Persentase Penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)**  
**di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 -2020 (%)**



*Sumber: Baznas Sumatera Barat Tahun 2015-2020*

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai kenaikan 1,14 persen. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) mengalami penurunan menjadi 0,98 persen. Tetapi pada tahun 2019 merupakan tahun yang tinggi dalam penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dengan capaian 1,19 persen, hal tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun 2020 karena situasi perekonomian yang terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga penerimaan zakat menurun menjadi 0,85 persen. Bahkan pada tahun 2020 adalah tahun terendah penerimaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) pada 6 tahun terakhir.

Hal ini tentu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Dimana dorongan zakat yang bersifat jangka pendek apabila zakat hanya dibagikan kepada penerima zakat untuk kebutuhan konsumtif masyarakat. Sedangkan zakat akan berdampak apabila zakat tidak hanya memenuhi kekurangan konsumsi saja tetapi zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi si penerima sehingga pendapatnya akan meningkat dimasa-masa yang akan datang bahkan diharapkan meningkat menjadi muzaki (pembayar zakat). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Islam menganjurkan untuk menyalurkan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang bersifat jangka panjang.

Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat saja tetapi disalurkan untuk memberdayakan ekonomi para mustahik (penerima zakat) seperti digunakan untuk membangun usaha, mengembangkan usaha yang sudah ada lain sebagainya, dengan itu Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) akan dapat

meningkatkan pendapatan para mustahik dan diharapkan akan mengubah status mereka menjadi muzaki (pembayar zakat). Jika semakin optimalnya penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dan ditujukan kepada orang-orang yang berhak dan tepat untuk mendapatkannya maka akan dapat meningkatkan kegunaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) tersebut, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat (Kriyantono, 2008).

**Gambar 1.2**  
**Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 -2020 (%)**



*Sumber: BPS Sumatera Barat Tahun 2015-2020*

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana tahun 2015 tercatat sebesar

7.2%, ditahun 2016 turun menjadi 7%, dan di tahun 2017 mengalami penurunan dengan angka persentase sebesar 6.8%, Sedangkan untuk tahun 2018 persentase kemiskinan mengalami penurunan menjadi 6.6%, dan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tercatat dengan angka persentase sebesar 6.4% dan 6.2%. Dapat disimpulkan bahwa persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami rata-rata penurunan sebesar 2% pertahunnya. Menurunnya angka kemiskinan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, semakin rendah angka kemiskinan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, sebaliknya semakin tinggi akan kemiskinan maka akan semakin rendah laju pertumbuhan ekonomi.

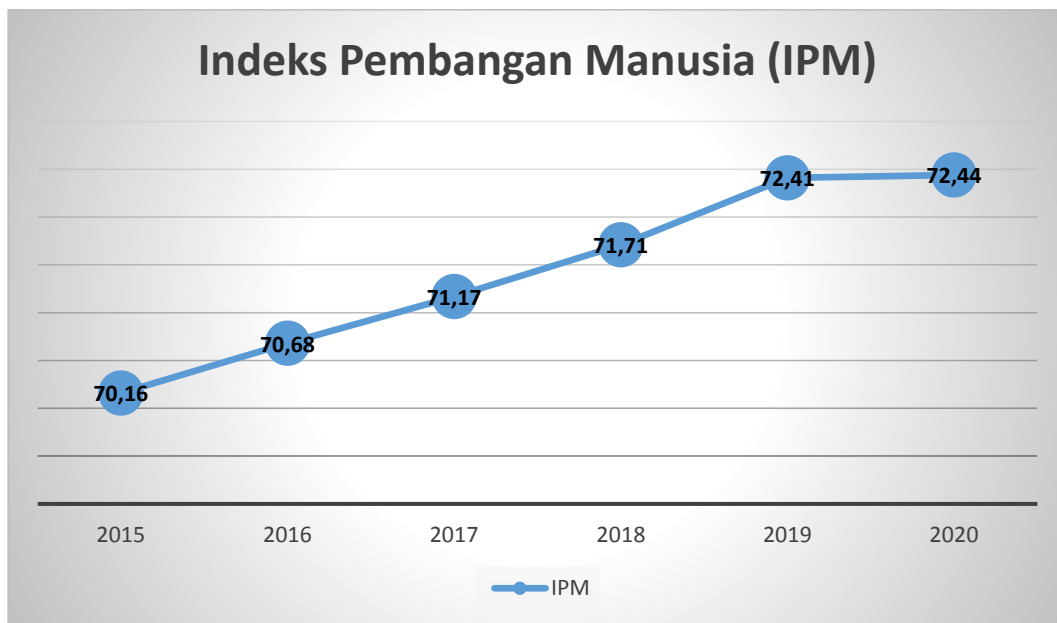
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan menurunkan kemiskinan begitu juga sebaliknya dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara maka meningkatkan kemiskinan di negara. Indonesia termasuk negara berkembang karena masih dibidang belum tinggi pertumbuhan ekonominya, jadi masih banyak tercatat penduduk miskin, masalah ini termasuk salah satu masalah perekonomian.

Menurut Brata (2005) kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang besar dengan adanya perbaikan indikator ekonomi tidak merata menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan kemiskinan harus diatasi secara menyeluruh dan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi pembangunan ekonomi saja, ada dugaan pembangunan sosial sangat penting dengan adanya perbaikan indikator ekonomi tidak merata menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan kemiskinan harus diatasi secara menyeluruh dan tidak cukup hanya



dilakukan dari sisi pembangunan ekonomi saja, ada dugaan pembangunan sosial sangat penting mengurangi kemiskinan.

**Gambar 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 -2020 (%)**



*Sumber: BPS Sumatera Barat Tahun 2015-2020*

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari Grafik 1.3 diatas. Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 1 hingga 2% untuk masing-masing daerah. Dimana IPM dikatakan baik dengan kategori tertinggi yaitu: nilai IPM 0,8 –1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi (Farathika, 2020). Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Farathika, 2020).

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dengan terjadinya fenomena-fenomena ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, khususnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang tidak lepas dari ketimpangan pendapatan yang menyebabkan tidak meratanya penyaluran atas Zakat Infaq Sahdaqahh (ZIS), begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak lepas dari kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera

Barat?

3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka dapat diterapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh seberapa besar pengaruh Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.
2. Untuk memperoleh seberapa besar pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.
3. Untuk memperoleh seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi kepada:

1. Pertimbangan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan terutama dalam Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.
2. Pertimbangan akademis untuk memperluas pengetahuan tentang Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.